

ADAPTASI DAN TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA POPODU SEJAK KRISIS MONETER (1998–2023)

Febriana Eka Putri Rahmat¹, Tonny Iskandar Mondong², Renol Hasan³

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; febrianarahmat24@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; tonnymondong@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; renolhasan@ung.ac.id

Corresponden E-Mail; febrianarahmat24@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 Juni 2026 Direvisi: 30 Juli 2026 Disetujui: 30 Agustus 2026 Tersedia Daring: 01 Oktober 2026 Kata Kunci: <i>Adaptasi Ekonomi; Desa Popodu; Krisis Moneter; Modernisasi Pedesaan; Sejarah Sosial Ekonomi</i>	Dinamika sosial ekonomi masyarakat pedesaan kerap diuji oleh guncangan nasional seperti krisis moneter 1998 dan tantangan arus modernisasi. Mengambil fokus di Desa Popodu, Bolaang Mongondow Selatan, kajian ini menelusuri riwayat perekonomian masyarakat sekaligus menganalisis proses adaptasi mereka sepanjang rentang tahun 1998 hingga 2023. Menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, data historis dalam kajian ini digali dari arsip RPJMDes, Profil Desa 2023, catatan statistik BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2022–2023, serta wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi setempat. Analisis terhadap sumber-sumber tersebut memperlihatkan pola ketahanan ekonomi berbasis lokal yang kuat, yang diindikasikan secara konkret oleh konsistensi warga mempertahankan profesi utamanya saat krisis serta tren produktivitas panen yang terus bertumbuh. Saat menghadapi lonjakan inflasi dan pelemahan rupiah pada 1998, masyarakat tidak mengubah profesi secara drastis, melainkan bertahan pada pekerjaan utama di sektor pertanian dan perikanan sambil mengoptimalkan perdagangan sebagai penyokong pendapatan alternatif. Sektor pertanian terbukti terus bertumbuh, terlihat dari peningkatan produksi padi dari 5.742,75 ton pada 2021 menjadi 8.177,58 ton pada 2022. Memasuki era modernisasi, struktur ekonomi desa semakin beragam lewat pertumbuhan UMKM dan adopsi teknologi berupa media sosial serta platform pembayaran digital, meski penggunaannya belum merata di seluruh kalangan warga. Perubahan ini juga berjalan beriringan dengan membaiknya tingkat pendidikan dasar hingga menengah serta akses ke fasilitas kesehatan dasar. Kesimpulannya, daya tahan ekonomi Desa Popodu bertumpu pada penguasaan mata pencaharian tradisional yang perlahan berintegrasi ke dalam ekosistem digital.

ABSTRACT
Keywords: <i>Community Adaptation, Economic History, Monetary Crisis, Popodu Village, Rural Modernization</i>
<i>The socio-economic dynamics of rural communities are frequently tested by national shocks such as the 1998 monetary crisis and the ongoing challenges of modernization. Focusing on Popodu Village, South Bolaang Mongondow, this study traces the community's economic history and analyzes their adaptation processes from 1998 to 2023. Utilizing the historical method encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, historical data were gathered from the RPJMDes archives, the 2023 Village Profile, South Bolaang Mongondow Regency BPS statistical records for 2022–2023, and in-depth interviews with local community leaders and economic actors. Analysis of these sources reveals a strong pattern of local-based economic resilience, concretely indicated by the residents' consistency in maintaining their primary professions during the crisis and the continuously growing trend of harvest productivity. During the severe inflation and currency depreciation in 1998, the community did not drastically change their</i>

professions; instead, they survived by maintaining their primary livelihoods in agriculture and fisheries while optimizing local trade as an alternative income source. Agriculture proved to be a stable economic pillar, evidenced by the surge in paddy production from 5,742.75 tons in 2021 to 8,177.58 tons in 2022. Entering the modernization era, economic activities diversified through the growth of MSMEs and the adoption of digital technologies, including social media marketing and digital payment platforms, although the distribution remains uneven. This transformation is also accompanied by improvements in basic to secondary educational attainment and access to grassroots healthcare facilities. In conclusion, the economic resilience of Popodu Village stems from mastering traditional livelihoods while gradually integrating into the modern digital ecosystem.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Desa dalam pengertian umum merupakan wilayah permukiman yang terletak di luar kawasan perkotaan, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan pada sektor agraris. Pola kehidupan masyarakat pedesaan sangat identik dengan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung melalui praktik pertanian, peternakan, maupun perikanan. Namun, karakteristik tradisional tersebut belakangan ini perlahan mulai bergeser. Desa-desanya di Indonesia tengah menghadapi dinamika transformasi yang cukup kompleks akibat ragam tekanan modernisasi, perubahan iklim, laju migrasi penduduk, hingga derasnya penetrasi globalisasi. Berbagai faktor eksternal ini secara langsung memaksa struktur sosial dan tumpuan ekonomi masyarakat pedesaan untuk terus beradaptasi demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Tantangan ekonomi yang paling memukul tatanan kehidupan masyarakat pedesaan sering kali muncul dalam bentuk guncangan makro, yang salah satu catatan terberatnya terjadi pada masa awal fase reformasi. Sekitar tahun 1998, Indonesia dihantam oleh krisis ekonomi berskala nasional yang eskalasinya berdampak sangat luas, tidak hanya melumpuhkan industri di perkotaan, tetapi merambat hingga ke pelosok desa. Krisis ini memukul telak kelangsungan sektor pertanian yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian desa. Nilai tukar rupiah yang anjlok secara tajam menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan harga di tingkat pasar terbawah. Para petani desa harus berhadapan dengan situasi pelik karena harga komoditas hasil panen mereka jatuh bebas, sementara biaya hidup dan kebutuhan pokok melonjak tajam. Pada rentang waktu krisis tersebut, akses masyarakat desa terhadap fasilitas ekonomi sentral seperti pasar yang memadai serta layanan perbankan menjadi sangat terbatas dan makin sulit dijangkau. Situasi kritis ini menciptakan tekanan berlapis yang memaksa warga pedesaan merumuskan strategi bertahan hidup di tengah resesi.

Guncangan krisis moneter 1998 pada kenyataannya tidak hanya melumpuhkan pusat-pusat industri di kawasan perkotaan yang bertumpu pada rantai pasok global,

melainkan turut menjalar dan menekan daya beli masyarakat pedesaan di kawasan timur Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Di wilayah ini, tekanan ekonomi dirasakan secara masif akibat melambungnya harga barang kebutuhan pokok dan biaya produksi yang tidak seimbang dengan nilai jual hasil bumi. Kondisi pelik tersebut juga menerpa masyarakat yang bermukim di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Secara historis, pada masa krisis 1998 wilayah ini masih bernaung di bawah administrasi wilayah induknya, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelum akhirnya dimekarkan secara otonom pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008. Bagi masyarakat pedesaan setempat, krisis ini memberikan tekanan berlapis yang menguji kelangsungan tatanan kehidupan subsisten mereka.

Salah satu wilayah pedesaan yang turut merekam jejak hantaman krisis dan proses pemulihan tersebut adalah Desa Popodu. Secara pembagian administratif, Desa Popodu merupakan satu dari tujuh belas desa yang bernaung di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini dikaruniai bentang kekayaan alam yang melimpah, sehingga secara demografis struktur mata pencaharian warganya didominasi oleh kelompok petani dan nelayan. Ketergantungan yang amat tinggi pada ritme hasil bumi dan fluktuasi tangkapan laut membuat perekonomian rumah tangga primer di Desa Popodu rentan terhadap dinamika pasar. Pemilihan Desa Popodu sebagai lokus studi kasus tidak semata-mata karena kekosongan kajian spesifik terdahulu, melainkan didasari oleh keunikan karakteristik historis dan spasialnya. Secara profil, Popodu mewakili entitas desa pesisir-agraris yang bertumpu erat pada hasil bumi dan tangkapan laut. Namun di sisi lain, wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berjarak 0 km dari pusat aktivitas ibu kota (Molibagu) saat ini, menjadikan Desa Popodu sebagai arena pengamatan yang ideal untuk menelusuri bagaimana masyarakat tradisional merespons, bertahan, dan beradaptasi terhadap tekanan krisis sekaligus arus modernisasi yang terpusat.

Secara garis besar, lanskap sosial ekonomi Desa Popodu bergerak amat dinamis melintasi tiga fase krusial: sebelum, saat, dan sesudah krisis. Sebelum hantaman krisis melanda, perekonomian warga sangat bergantung pada pola tradisional dengan komoditas andalan seperti kopra, cengkih, dan padi sawah, yang tingkat kesejahteraannya rentan terganggu oleh fluktuasi harga tengkulak serta terbatasnya alat tangkap nelayan. Saat krisis moneter 1998 memuncak, warga dihadapkan pada masa-masa sulit; namun alih-alih mengalami keruntuhan sistem ekonomi, mereka bertahan dengan gigih menjaga roda produksi pertanian primer seraya menjadikan perdagangan skala kecil sebagai katup pengaman alternatif. Memasuki fase setelah krisis hingga tahun 2023, pemulihan bergerak ke arah transformasi berkat intervensi perbaikan infrastruktur, masuknya aliran listrik, hingga pengadopsian pembayaran digital (*FinTech*) yang memicu pergeseran masyarakat menuju tatanan ekonomi modern serta mendorong suburnya sektor UMKM lokal.

Menelusuri riwayat historisnya, Desa Popodu tidak bertindak pasif atau sekadar bertahan melewati masa krisis. Sepanjang rentang waktu pengamatan dari tahun 1998

hingga 2023, wilayah pedesaan ini justru memperlihatkan fase transformasi ekonomi yang bergulir cukup progresif. Pemilihan tahun 1998 sebagai titik awal batasan historis dikarenakan periode tersebut merepresentasikan puncak turbulensi makroekonomi yang memaksa masyarakat desa secara empiris menguji ketahanan subsisten dan merombak pola bertahan hidup mereka. Sementara itu, tahun 2023 ditetapkan sebagai batas akhir pengamatan karena pada titik waktu ini, rangkaian proses adaptasi dan pemulihan pasca-krisis telah menunjukkan hasil; Desa Popodu telah bertransformasi dari desa agraris konvensional menjadi entitas mandiri yang sukses mengintegrasikan sarana fasilitas modern, jangkauan pendidikan, dan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rutinitas perekonomian lokalnya. Transformasi desa ini ditandai dengan masifnya injeksi pembangunan infrastruktur jalan yang perlahan membuka isolasi wilayah. Bersamaan dengan perbaikan fisik tersebut, terjadi peningkatan aksesibilitas warga terhadap pemenuhan layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Arus modernisasi juga merasuk ke sendi kehidupan warga melalui adopsi pemanfaatan perangkat teknologi. Rangkaian perubahan ini secara bertahap memicu berkembangnya denyut sektor perdagangan lokal serta menumbuhkan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengubah pola perekonomian desa menjadi lebih modern dan terpadu.

Untuk menganalisis fenomena transisi tersebut, kerangka berpikir dalam kajian ini berpijak pada dua landasan teoretis utama. Pertama, pisau analisis menggunakan konsep perubahan sosial dari MacIver (dalam Murdiyanto, 2020), yang memandang perubahan sosial sebagai sebuah proses pergeseran dalam interaksi maupun keseimbangan hubungan antar warga di dalam struktur suatu masyarakat. Gagasan ini relevan untuk melihat secara jernih bagaimana pola pikir dan tatanan relasi warga Popodu berevolusi dari kondisi sulit menuju era keterbukaan. Kedua, telaah ini ditopang oleh operasionalisasi konsep pembangunan ekonomi dari Todaro (dalam Hasan & Aziz, 2018). Pembangunan ekonomi diposisikan tidak sekadar sebagai deretan akumulasi angka pertumbuhan finansial, melainkan sebuah siklus panjang yang bermuara pada peningkatan pendapatan per kapita dengan menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Guna memetakan posisi dan kontribusi akademisnya, kajian ini berdialog dengan sejumlah penelitian terdahulu yang secara tematik mengangkat sejarah sosial ekonomi pedesaan. Eko Murdiyanto (2020) melalui bukunya *Sosiologi Pedesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa* membedah konsep kemasyarakatan desa secara utuh dan komprehensif. Pustaka rujukan ini menjabarkan bagaimana pembangunan dan perubahan pola perilaku masyarakat desa banyak dipengaruhi oleh faktor bentang geografi, kultural pertanian, roda ekonomi, hingga kelengkapan tata administrasi. Karya teoretis ini menjadi fondasi yang penting untuk memetakan perilaku warga desa, meskipun tidak bermaksud menitik pada studi kasus empiris di satu wilayah spesifik pada rentang waktu krisis.

Kajian empiris berdimensi historis lainnya pernah digarap oleh Ii Rubi Kandar (2014) yang meneliti dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunung Kidul pada masa penerapan Revolusi Hijau sepanjang periode 1970 hingga 1974. Penelitian

tersebut menganalisis pergeseran sosial lewat kaca mata pola penguasaan lahan garapan oleh petani. Kandar (2014) berhasil membuktikan bahwa kendati program masif Revolusi Hijau berimplikasi pada meroketnya kuantitas produksi beras, intervensi tersebut nyatanya memantik ketimpangan distribusi keuntungan yang berujung pada terbentuknya jurang stratifikasi sosial yang baru di lingkungan pedesaan.

Penelusuran historis dengan rentang temporal yang lebih mutakhir adalah karya Inayah Putriani dkk. (2023), yang menginvestigasi sejarah sosial ekonomi komunitas petani garam di Desa Arungkeke, Kabupaten Jeneponto antara tahun 2012 hingga 2020. Hasil riset komparatif mereka mengerucut pada simpulan yang positif, di mana para petambak garam di pesisir desa tersebut dievaluasi telah mencapai taraf hidup kesejahteraan yang mapan. Capaian standar hidup ini secara empiris diidentifikasi sebagai buah manis dari serangkaian program pemberdayaan dan dukungan intervensi kebijakan dari pemerintah setempat.

Ketiga rujukan literatur di atas berfokus pada perekaman sejarah perubahan sosial ekonomi pelbagai entitas pedesaan. Kendati demikian, terdapat celah spasial dan temporal yang sangat tegas, yang kemudian menjadi letak penawaran kebaruan pada artikel jurnal ini. Penelusuran akademik sebelumnya menilik pada demografi geografi dan rentang linimasa yang sama sekali berbeda. Sampai naskah ini disusun, belum ada publikasi ilmiah yang mendedikasikan analisisnya untuk merekam potret riwayat Desa Popodu, terlebih dengan membentangkan rentang waktu observasi yang krusial, yang berawal dari titik lumpuh imbas krisis moneter 1998 hingga merambah adaptasi fase modernisasi di penghujung tahun 2023.

Berangkat dari kekosongan literatur dan uraian konteks latar belakang yang telah dikemukakan, konstruksi pemikiran dalam artikel ini difokuskan untuk menjawab dua pokok persoalan kajian. Persoalan pertama dirumuskan guna membedah dan menarasikan bagaimana wujud nyata kehidupan sosial serta arsitektur ekonomi masyarakat Desa Popodu, Bolaang Mongondow Selatan sepanjang pergulatan dari tahun 1998 hingga 2023. Persoalan kedua dirancang khusus untuk menelisik secara mendalam alur proses adaptasi yang dilakukan oleh warga desa tatkala terhantam berbagai ujian ekonomi, yang terentang dari krisis moneter hingga tekanan gelombang modernisasi yang berangsur mengubah pola kerja mereka. Oleh karenanya, kajian historis ini secara paralel bertujuan untuk merekonstruksi jejak kehidupan sosial ekonomi sekaligus menguliti strategi pertahanan ketahanan hidup warga Desa Popodu.

2. Metode

Kajian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif yang mengaplikasikan pendekatan metode sejarah secara terstruktur. Pelaksanaan penelitian dipusatkan di wilayah Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Ruang lingkup temporal untuk telaah ini direntangkan selama dua setengah dekade, bermula dari tahun 1998 hingga bermuara pada tahun 2023. Penarikan garis waktu dan pemilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa Desa Popodu menyimpan rekam jejak transformasi ekonomi masyarakat agraris dan pesisir yang mampu bertahan melewati resesi nasional hingga merespons arus modernisasi,

sebuah dimensi perubahan yang membutuhkan pembacaan historis agar terpetakkan secara utuh.

Untuk membedah dinamika sosial ekonomi pada rentang waktu tersebut, operasionalisasi penelitian dijalankan melalui empat tahapan prosedural baku dalam ilmu sejarah, yang meliputi proses heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan diakhiri dengan penulisan historiografi.

2.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Langkah awal penelitian difokuskan pada pelacakan dan penghimpunan sumber-sumber yang memuat informasi historis relevan. Proses penggalan sumber primer dilakukan dalam dua format, yakni dokumen tertulis dan kesaksian lisan. Pelacakan dokumen tertulis dilakukan melalui studi dokumen secara langsung di kantor arsip desa dan penelusuran digital pada basis data BPS resmi. Untuk dokumen primer tertulis, pengumpulan berpusat pada penelusuran arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Popodu periode 2018–2026, dokumentasi peta tata ruang desa, serta himpunan surat-surat resmi yang diterbitkan pemerintah desa, utamanya yang berkaitan dengan program penyaluran bantuan untuk kelompok petani dan nelayan lokal. Sementara itu, sumber primer lisan digali melalui prosedur wawancara mendalam bersama para tokoh masyarakat serta warga yang menjadi pelaku ekonomi langsung di Desa Popodu. Jaring informan ini mencakup Siradjudin Yusuf dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Popodu, lalu disusul oleh warga pelaku usaha dan pekerja sektor tradisional seperti Andi Bilondatu, Safrianto Pakia, Irfan Melu, Cristian Rumengan, Maimuna Katili, serta Serli Thalib. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria utama bahwa informan merupakan pelaku sejarah langsung yang bermukim di Desa Popodu dan mengalami secara empiris masa krisis 1998 hingga era modernisasi. Pengumpulan data lisan menggunakan teknik wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilaksanakan secara langsung di kediaman dan tempat usaha masing-masing informan pada kurun waktu Januari hingga Maret 2026. Perlu dicatat, penelitian ini tidak menggunakan sumber sekunder berupa surat kabar mengingat keterbatasan akses arsip lokal pada periode yang dikaji, sehingga rekonstruksi data murni bersandar pada arsip resmi desa dan memori kolektif masyarakat. Setiap informan diwawancarai untuk memetakan aspek yang berbeda, mulai dari pembedahan kondisi mata pencaharian utama warga, perumusan strategi bertahan pada puncak krisis, hingga evaluasi pemanfaatan teknologi baru dalam mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi. Rangkaian data primer ini selanjutnya diperkuat oleh sumber sekunder melalui studi pustaka komprehensif terhadap literatur sosiologi pedesaan, kajian krisis ekonomi, operasionalisasi UMKM, dan literasi teknologi ekonomi. Sebagai penyangga analisis kuantitatif, dihimpun pula data rilis instansi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan publikasi tahun 2022–2023.

Untuk memberikan gambaran rinci mengenai pemetaan sumber yang digunakan, instrumen heuristik dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jenis, Sumber, dan Kegunaan Data

Jenis Data	Sumber	Bentuk	Kegunaan dalam Analisis
Primer (Dokumen)	Pemerintah Desa Popodu	Arsip RPJMDes 2018– 2026, Peta Desa, Profil Desa 2023, Surat Edaran/Bantuan	Melacak kebijakan lokal, demografi, struktur tata ruang, dan program pemberdayaan UMKM/pertanian.
Primer (Lisan)	Kepala Desa, Petani, Nelayan, Pedagang Desa Popodu	Transkrip/Rekaman Wawancara Mendalam	Merekonstruksi memori kolektif mengenai strategi bertahan (adaptasi) saat krisis 1998 dan penggunaan teknologi modern.
Sekunder (Statistik)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rilis Publikasi BPS Bolsel Tahun 2022–2023	Menjadi penyangga kuantitatif untuk membuktikan peningkatan volume produksi pertanian dan sebaran pendidikan.
Sekunder (Pustaka)	Buku Sosiologi Pedesaan, Skripsi Terdahulu, Jurnal Akademik	Literatur Cetak dan Digital	Memperkuat landasan teoritis mengenai perubahan sosial, kemiskinan, dan ekonomi desa.

2.2 Kritik Sumber (Verifikasi)

Sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan pada tahap pertama kemudian diuji kelayakan dan keabsahannya melalui tahapan verifikasi atau kritik sumber. Pengujian ini ditempuh lewat dua instrumen, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dititikberatkan untuk menilai tingkat keaslian (*authenticity*) dari dokumen-dokumen tertulis. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan wujud fisik dokumen serta pencocokan waktu pembuatan arsip untuk memastikan tidak adanya manipulasi pada dokumen RPJMDes maupun manuskrip surat-surat desa yang dianalisis. Pemeriksaan wujud fisik ini secara operasional dilakukan dengan meneliti keabsahan kop surat resmi, stempel instansi pemerintah desa, serta legalitas tanda tangan otoritas terkait pada masa dokumen tersebut diterbitkan. Di sisi lain, instrumen kritik internal diaplikasikan untuk menakar kadar kredibilitas sumber-sumber lisan. Verifikasi ini dijalankan dengan menelisik silang latar belakang para informan demi memastikan bahwa figur yang diwawancarai benar-benar bertindak sebagai pelaku sejarah yang terlibat langsung di dalamnya. Langkah ini sangat esensial agar riwayat mengenai adaptasi krisis benar-benar terekam dari pelaku ekonomi empiris di lapangan, bukan sekadar cerita berantai atau kesaksian dari tangan ketiga. Selanjutnya, verifikasi internal ini dipertajam melalui metode triangulasi; yakni menyilangkan kesaksian antar-informan (misalnya membandingkan narasi petani dengan pandangan pedagang), serta mencocokkan klaim

informan lisan dengan data kuantitatif dari dokumen desa maupun angka BPS guna memastikan konsistensi dan akurasi fakta yang ditafsirkan.

2.3 Interpretasi (Penafsiran)

Setelah tumpukan sumber sejarah dinyatakan lolos pengujian autentisitas dan kredibilitas, penelitian beranjak ke fase penafsiran. Fakta-fakta yang telah diverifikasi mulai diklasifikasikan dan dirajut berdasarkan pola tematik, seperti tema struktur mata pencaharian, daya tahan warga saat krisis ekonomi 1998, hingga gelombang adopsi teknologi pembayaran digital. Pengklasifikasian tema ini kemudian dipetakan secara terstruktur ke dalam periodisasi historis yang mencakup: gambaran sosial ekonomi sebelum krisis, kondisi ketika krisis memuncak (1998), dan upaya pemulihan pasca-krisis hingga fase digitalisasi UMKM (2023). Apabila dalam prosesnya ditemukan data yang saling berbeda misalnya bias ingatan informan dengan catatan birokrasi peneliti mengambil sikap objektif dengan menjadikan data statistik tertulis sebagai acuan fakta dasar, sementara memori lisan diposisikan sebagai penjelas nuansa sosialnya. Interpretasi atas pengelompokan data tersebut dikerjakan dengan memegang teguh objektivitas ilmiah. Dalam tahap interpretasi ini, konsep-konsep dasar dimanfaatkan secara operasional sebagai lensa analisis; teori perubahan sosial *MacIver* dipakai untuk menguliti pergeseran pola interaksi dan struktur tatanan masyarakat tatkala teknologi pembayaran (*FinTech*) mulai merambah keseharian mereka, sedangkan konsep pembangunan ekonomi Todaro digunakan untuk mengukur indikator pemerataan kesejahteraan dan daya lenting desa setelah selamat dari krisis. Penafsiran meramu tiga bentuk teknis dasar penulisan sejarah, yakni teknik deskripsi untuk memotret realitas fisik dan sosial desa, teknik narasi untuk menyusun kronologi perubahan dari masa ke masa, serta teknik analisis untuk menelusuri kaitan di balik fenomena dan keputusan ekonomi warga Popodu.

2.4 Historiografi (Penulisan Sejarah)

Fase pamungkas dalam metodologi sejarah ini adalah historiografi. Pada tahap ini, seluruh temuan dari kerja heuristik, pengujian kritik sumber, dan perakitan makna pada tahap interpretasi dilebur serta direkonstruksi menjadi sebuah tulisan akademis. Penulisan historiografi dalam kajian ini diposisikan sebagai sebuah sarana eksplanasi terstruktur untuk menghadirkan uraian komprehensif perihal sejarah transformasi dan adaptasi sosial ekonomi masyarakat Desa Popodu, sejak terpaan krisis 1998 hingga memasuki ruang modernisasi di tahun 2023. Secara konstruktif, penyajian tulisan ini mengadopsi pola tematik-kronologis, di mana pemaparan peristiwa disusun berdasarkan tema-tema aktivitas ekonomi yang kemudian diurutkan secara linier mengikuti dinamika perubahan dari era krisis hingga epos kemajuan saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Popodu Tahun 1998-2023

Secara geografis, Desa Popodu menempati posisi yang sangat menguntungkan karena berdekatan langsung dengan pusat aktivitas ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kedekatan dengan pusat pemerintahan ini turut mewarnai pergerakan ekonomi warganya. Pada mulanya, denyut nadi perekonomian desa ini amat

bergantung pada ketangguhan sektor tradisional, di mana komoditas hasil bumi seperti kelapa yang diolah menjadi kopra, cengkih, dan padi sawah menjadi primadona andalan. Sayangnya, kesejahteraan para petani pada masa-masa tersebut kerap kali diwarnai ketidakpastian. Pendapatan mereka rentan goyah akibat praktik permainan harga di tingkat tengkulak serta fluktuasi nilai jual komoditas di pasar global. Selain menggarap lahan, letak desa yang berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini menjadikan profesi nelayan sebagai tumpuan hidup sebagian warga. Kehadiran fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi bukti nyata betapa sektor maritim memegang peran penting, walaupun pada masa lalu armada laut dan peralatan tangkap yang digunakan nelayan Popodu masih tergolong sederhana.

Memasuki era yang kian modern, struktur mata pencaharian warga mulai berdiferensiasi, meski sektor pertanian dengan komoditas kelapa, jagung, dan ragam tanaman pangan tetap menduduki posisi dominan. Catatan dari Profil Desa Popodu tahun 2023 memperlihatkan bahwa ruang lingkup profesi penduduk makin meluas, merambah ke sektor jasa dan tenaga kerja formal. Warga desa kini banyak yang berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, karyawan swasta, buruh kayu dan batu, hingga pekerja jasa lepas. Transformasi ini juga tampak benderang dari mekarnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena yang paling mencolok di sepanjang jalan utama desa adalah menjamurnya warung-warung kopi. Keberadaan warung kopi ini bukan sebatas menggerakkan roda perputaran uang skala kecil, melainkan telah beralih rupa menjadi titik pusat interaksi sosial warga untuk bertukar informasi dan memelihara keakraban.

Kendati sektor jasa dan perdagangan lokal mulai tumbuh subur, pijakan ekonomi Desa Popodu nyatanya tetap bertumpu kuat pada sektor pertanian. Merujuk pada arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan catatan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2022-2023, laju produksi pangan desa ini terus menunjukkan tren yang positif.

Tabel 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Indikator	2021	2022	Keterangan
Luas Panen (Ha)	1.457,00	1.980,94	Meningkat
Produksi Padi (Ton)	5.742,75	8.177,58	Meningkat
Produktivitas (Ton/Ha)	39,41	41,28	Meningkat

Rekapitulasi pada tabel di atas merekam dengan jelas ketangguhan sektor agraris di tengah derasnya arus modernisasi. Luasan lahan panen padi meluas cukup tajam dari 1.457 hektare menjadi 1.980,94 hektare hanya dalam kurun waktu satu tahun. Perluasan lahan tersebut berbanding lurus dengan lonjakan produksi gabah yang berhasil menembus angka 8.177,58 ton pada tahun 2022, disertai naiknya angka produktivitas per hektare. Lonjakan data ini mengisyaratkan bahwa alih-alih meninggalkan sawah dan ladang demi pekerjaan perkotaan, masyarakat desa justru semakin cermat mengoptimalkan pemanfaatan lahan garapannya. Pertanian tetap dipertahankan sebagai jaring pengaman ekonomi yang paling diandalkan warga, sekaligus penopang stabilitas ketahanan pangan di tingkat kabupaten.

Kemampuan laju ekonomi warga ini berjalan beriringan dengan ikatan sosial yang rekat. Interaksi sosial di Desa Popodu terbangun secara alami dan dinamis, baik melalui kontak langsung secara tatap muka maupun melalui komunikasi yang difasilitasi oleh perantara media. Pola kebersamaan ini memancar dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam aktivitas belajar-mengajar di lingkungan desa, di mana budaya kerja sama masih melekat kuat sebagai cara warga menyelesaikan ragam urusan sehari-hari. Kerukunan ini pun terjalin amat baik di dalam keragaman latar belakang kepercayaan. Pendataan tahun 2023 mencatat total penduduk desa ini menyentuh angka 1.955 jiwa. Mayoritas dari jumlah tersebut memeluk agama Islam, sementara sebagian kecil lainnya merupakan penganut agama Kristen dan Katolik. Perbedaan ini hidup berdampingan secara harmonis.

Beralih pada aspek mutu sumber daya manusia, potret pendidikan warga Desa Popodu menawarkan realitas demografis yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Pendataan dari Sistem Informasi Desa Popodu tahun 2023 mendata 1.973 jiwa dalam cakupan Kartu Keluarga (KK) dengan rincian tingkat kelulusan sebagai berikut.

Tabel 3. Pendataan dari Sistem Informasi Desa Popodu tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Tidak/belum sekolah	86	47	39
Belum tamat SD	205	103	102
Tamat SD / Sederajat	720	419	301
SLTP / Sederajat	402	202	200
SLTA / Sederajat	426	236	190
Diploma I / II	12	7	5
Diploma III	10	4	6
Diploma IV/S1	104	46	58
Strata II	8	3	5
Strata III	0	0	0

Jika ditelaah secara saksama, struktur pendidikan masyarakat Popodu sangat didominasi oleh kelompok lulusan pendidikan dasar hingga jenjang menengah atas. Penduduk dengan ijazah tamatan Sekolah Dasar (SD) menempati proporsi paling gemuk sebanyak 720 jiwa, disusul oleh kelompok tamatan SLTA (426 jiwa) dan SLTP (402 jiwa). Sebaliknya, kuantitas warga yang berhasil menuntaskan studi di jenjang perguruan tinggi tingkat sarjana (Diploma IV/S1) masih tergolong minim, yakni hanya 104 orang, dan grafiknya semakin mengecil pada jenjang pascasarjana. Realitas angka ini mengisyaratkan bahwa kemampuan ekonomi atau kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan tinggi masih butuh didorong lebih kuat. Kualitas pendidikan yang terkonsentrasi di level menengah ke bawah ini kelak akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja, sehingga desa butuh strategi pemberdayaan yang presisi agar sumber daya manusianya kelak mampu beradaptasi dalam persaingan ekonomi dan teknologi yang terus maju.

Untuk menambal celah pada sektor SDM tersebut, pemerintah desa berupaya keras mengimbangi kualitas hidup warga dengan menghadirkan layanan kesehatan akar rumput yang mudah dijangkau. Jaminan kesehatan warga dari jenjang usia dini hingga usia senja diwujudkan lewat pengoperasian tiga fasilitas komunitas, yaitu satu unit

posyandu balita, satu posyandu lansia, serta satu posbindu (pos pembinaan terpadu). Upaya pemeliharaan tubuh secara preventif tidak dibiarkan terhenti pada wacana; masyarakat secara aktif digerakkan melalui kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penyaluran program makanan tambahan bernutrisi secara berkala. Lebih jauh lagi, sistem kelembagaan desa ini rutin menjalankan serangkaian program pembinaan, mulai dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), hingga Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja). Integrasi dari kekuatan lumbung pertanian yang stabil, kepedulian tinggi pada kesehatan komunal, dan pelan-pelan memperbaiki iklim pendidikan inilah yang membentuk fondasi sosial masyarakat Desa Popodu untuk terus berdiri tegak melintasi ragam ujian zaman.

Realitas transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer menuju diversifikasi mata pencaharian (khususnya UMKM dan sektor jasa) di Desa Popodu dapat dibaca secara komprehensif melalui kacamata konseptual MacIver mengenai perubahan sosial. Pergeseran struktur ini tidak sekadar mengubah angka statistik pekerjaan, melainkan merombak tatanan interaksi sosial masyarakat; fenomena menjamurnya warung kopi misalnya, telah bermutasi dari sekadar unit ekonomi transaksional menjadi ruang publik tempat negosiasi, pertukaran informasi, dan kohesi sosial warga terbentuk secara dinamis. Lebih lanjut, merujuk pada operasionalisasi konsep pembangunan ekonomi dari Todaro, pertumbuhan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan preventif komunitas (posyandu dan posbindu), serta peluasan pemanfaatan infrastruktur desa menunjukkan bahwa Popodu sedang mengalami proses pembangunan yang esensial. Pembangunan di kawasan pedesaan ini dievaluasi tidak lagi hanya berpijak pada akumulasi modal finansial perseorangan, melainkan mulai menyentuh substansi pemerataan kualitas hidup, integrasi sosial, dan perbaikan kesejahteraan manusia secara utuh yang menjadi prasyarat mutlak terwujudnya transformasi pedesaan yang berkelanjutan (Sztompka, 2004).

3.2 Krisis Moneter 1998 dan Strategi Bertahan Masyarakat Desa Popodu

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai memasuki fase turbulensi ketika nilai tukar rupiah mengalami guncangan yang dengan cepat bermutasi menjadi krisis ekonomi berskala nasional. Sepanjang tahun 1998, depresiasi rupiah terjadi begitu tajam hingga melemah lebih dari 70 persen, menyentuh titik nadirnya pada bulan Juli 1998 saat kurs anjlok ke kisaran Rp14.700 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan mata uang ini secara langsung memicu efek domino pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Tingkat inflasi nasional yang pada periode 1991 hingga 1996 relatif terkendali di rata-rata 8,1 persen, seketika melonjak drastis hingga mencapai angka 77,6 persen pada tahun 1998. Lonjakan inflasi yang luar biasa ini terutama dipicu oleh melambungnya harga barang-barang yang diperdagangkan secara internasional, yang merembet pada naiknya biaya produksi dalam negeri. Dalam kepanikan finansial tersebut, instrumen moneter terpaksa ditarik ketat; Bank Indonesia berupaya keras menahan laju pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor satu bulan hingga menyentuh angka 70 persen pada Juli 1998.

Situasi makroekonomi yang memburuk memukul daya beli masyarakat secara masif. Indikator pelemahan ini terekam jelas dari kontraksi arus perdagangan, di mana

volume impor barang konsumsi merosot 34 persen serta nilai ekspor minyak dan gas turun sebesar 36 persen pada tahun yang sama. Di tingkat nasional, badai krisis ini meruntuhkan fondasi banyak perusahaan berskala besar yang mengandalkan utang luar negeri maupun bahan baku impor, berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, anomali ketahanan ekonomi justru muncul dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal. Entitas usaha mikro ini terbukti relatif mampu bertahan menghadapi hantaman krisis lantaran skala usahanya yang kecil membuatnya jauh lebih fleksibel dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar yang drastis.

Gelombang krisis ekonomi tersebut pada gilirannya tidak hanya melumpuhkan pusat-pusat industri di perkotaan, tetapi juga mengalir hingga ke wilayah pedesaan seperti Desa Popodu. Warga desa ikut merasakan imbas meroketnya harga barang kebutuhan sehari-hari, namun realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tidak terjadi keruntuhan tatanan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Bilondatu, masyarakat Popodu menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi yang cukup solid dengan bersandar penuh pada optimalisasi pekerjaan utama masing-masing. Di tengah kepanikan ekonomi, para petani memilih untuk tetap memusatkan tenaga pada aktivitas pertanian guna mengamankan ketersediaan pangan dan menjaga rantai produksi komoditas. Di saat bersamaan, para nelayan tetap konsisten mengarungi laut sebagai tumpuan penghasilan keluarga, sementara warga yang berprofesi sebagai pedagang tetap menjalankan aktivitas jual-beli meskipun pasar sedang lesu. Pola perilaku kolektif ini memperlihatkan bahwa warga Popodu lebih memilih strategi bertahan hidup dengan memperkuat mata pencaharian tradisional yang telah mereka kuasai, daripada mengambil jalan pintas berpindah ke jenis pekerjaan baru yang belum tentu menjanjikan keberhasilan.

Ketangguhan ekonomi subsisten tersebut juga ditopang oleh kelincahan warga dalam mencari celah penghasilan tambahan. Menurut Safrianto Pakia, respons yang paling menonjol di Desa Popodu kala krisis adalah manuver warga untuk mengoptimalkan sektor perdagangan lokal sebagai sumber penghasilan alternatif yang utama. Sektor perdagangan menjadi pilihan logis karena aktivitas ini lebih mudah diakses oleh masyarakat umum dan perputaran uangnya lebih cepat. Lebih dari itu, aktivitas jual-beli tidak terlalu bergantung pada cuaca maupun kondisi alam, berbeda halnya dengan sektor agraris dan kelautan yang sangat rentan terhadap perubahan musim. Pakia juga menyoroti bahwa dominasi sektor perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh realitas geografis desa. Jarak Desa Popodu yang lumayan jauh dari wilayah pesisir menciptakan rintangan tersendiri bagi warga untuk merutinkan aktivitas melaut, sehingga membatasi kapasitas ekspansi di sektor perikanan. Keterbatasan spasial ini pada akhirnya memaksa energi produktif warga disalurkan ke sektor perniagaan untuk menambal defisit ekonomi keluarga.

Keputusan-keputusan rasional di tingkat akar rumput ini dinilai oleh Irfan Melu bukan semata-mata cerminan kemandirian individu dalam mencari nafkah. Langkah warga Popodu merupakan representasi dari bentuk adaptasi sosial-ekonomi yang sederhana, tetapi memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Dengan mempertahankan

peran yang selaras dengan keahlian dasar masing-masing, masyarakat berhasil melindungi fondasi stabilitas ekonomi rumah tangganya. Sikap ini menunjukkan manajemen risiko yang cermat, di mana warga secara kolektif menghindari spekulasi dan perubahan haluan pekerjaan yang drastis di tengah ketidakpastian iklim ekonomi nasional.

Mekanisme pertahanan hidup yang dipraktikkan di Desa Popodu ini sesungguhnya merupakan miniatur dari pola resiliensi ekonomi nasional yang terjadi di era krisis 1998. Terdapat korelasi yang sangat jelas antara fenomena bertahannya UMKM secara agregat nasional dengan ketangguhan sektor informal dan perdagangan skala kecil di pedesaan. Ketika sektor formal dan industri raksasa terpuruk akibat ketergantungan pada rantai pasok global, ekonomi berbasis lokal yang nyaris tidak tersentuh oleh utang dolar justru bertransformasi menjadi peredam kejut yang menyelamatkan struktur sosial dari kemiskinan ekstrem.

Pilihan strategi yang diambil oleh masyarakat Popodu terbukti sangat realistis dan berpijak pada kalkulasi risiko yang minim. Alih-alih berspekulasi membuka lahan usaha baru yang tidak dikenali, mempertahankan rutinitas produksi di sektor yang sudah akrab sambil merintis usaha dagang berskala kecil merupakan langkah paling adaptif untuk merespons keterbatasan akses modal dan bentang geografis. Rangkaian fakta historis ini pada akhirnya menegaskan bahwa badai krisis 1998 tidak memicu kelumpuhan total di Desa Popodu. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berat tersebut justru menguji dan membuktikan kokohnya ketahanan ekonomi berbasis lokal, yang bersumber dari keuletan serta fleksibilitas warganya dalam beradaptasi.

Secara analitis, keberhasilan masyarakat Popodu menavigasi resesi nasional yang parah ini merepresentasikan tingginya kapasitas resiliensi ekonomi berbasis pedesaan. Ketika inflasi meroket hingga 77,6 persen dan rupiah terdepresiasi tajam menyentuh Rp14.700 per dolar AS, masyarakat desa terbukti tidak merespons dengan kepanikan struktural. Sebaliknya, mereka mengaplikasikan strategi adaptasi penghidupan (*livelihood strategy*) dalam bentuk penghindaran risiko (*risk aversion*). Keputusan kolektif para petani dan nelayan sebagaimana dipertegas oleh kesaksian Andi Bilondatu dan Irfan Melu untuk tidak melakukan migrasi profesi merupakan bentuk rasionalitas ekonomi; mereka memilih bertahan pada sektor subsisten yang memberikan kepastian jaminan ketersediaan pangan rumah tangga. Sementara itu, manuver warga dalam mengambil celah perniagaan lokal berskala kecil, merujuk pada penuturan Safrianto Pakia, mengonfirmasi teori ketahanan ekonomi bahwa sektor informal dan aktivitas perdagangan di tingkat desa (*local economy*) berfungsi sangat efektif sebagai peredam kejut (*shock absorber*) dalam meminimalisasi hantaman krisis makro (Rose, 2004).

3.3 Pemanfaatan Teknologi dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Popodu

Perkembangan peranti dan sistem modern lambat laun mulai meresap ke dalam tatanan ekonomi masyarakat pedesaan. Di Desa Popodu, instrumen baru ini secara perlahan mengambil peran penting dalam menopang tiga pilar utama kegiatan ekonomi, yaitu proses produksi, rantai distribusi, hingga pola konsumsi. Sebagaimana diamati oleh Andi Bilondatu, besarnya potensi ekonomi desa yang bersumber dari sektor pertanian,

perikanan, dan perniagaan kini mulai bersinggungan langsung dengan kehadiran dan pemanfaatan inovasi tersebut. Integrasi perangkat modern ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan infrastruktur dasar, khususnya akses elektrifikasi. Kestabilan pasokan listrik menjadi fondasi esensial yang mendorong produktivitas UMKM, karena memungkinkan jam operasional aktivitas ekonomi warga berlanjut hingga malam hari. Lebih dari itu, masuknya aliran listrik secara memadai menopang kelancaran operasional mesin produksi, sekaligus membawa dampak ikutan yang positif bagi kualitas pendidikan melalui kelancaran penggunaan perangkat belajar, serta menunjang layanan fasilitas kesehatan yang amat bergantung pada pasokan daya untuk peralatan medis.

Berpijak pada infrastruktur dasar tersebut, masyarakat Popodu secara bertahap mulai mengadopsi penggunaan peralatan yang lebih mutakhir pada tahap produksi. Para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, yang sebelumnya sangat bertumpu pada alat-alat manual kini mulai memanfaatkan permesinan dan instrumen yang lebih efisien. Pergeseran sarana prasarana produksi ini memberikan implikasi yang nyata berupa peningkatan volume hasil panen dan tangkapan, sekaligus menekan biaya operasional melalui efisiensi waktu dan tenaga kerja harian. Pada mata rantai selanjutnya, yakni tahap distribusi, perangkat komunikasi pintar dan jejaring internet menawarkan solusi perluasan pasar. Merujuk pada pandangan Cristian Rumengan, pemanfaatan media sosial dan berbagai aplikasi komunikasi instan berperan vital sebagai sarana promosi dan penjualan. Penawaran barang yang dahulu hanya terbatas di ruang lingkup internal desa, kini mampu membidik dan menjangkau basis konsumen yang berada jauh di luar batas daerah Popodu.

Transformasi yang tidak kalah nyata juga merambah area konsumsi seiring dengan munculnya layanan Financial Technology (FinTech). Berbagai platform keuangan, mulai dari aplikasi jual-beli daring hingga payment gateway (sistem pembayaran digital), mulai dikenal dan dimanfaatkan oleh warga untuk mempercepat durasi transaksi secara efisien. Kehadiran medium pembayaran digital ini perlahan memicu pergeseran perilaku ekonomi, di mana sebagian masyarakat mulai mengurangi ketergantungan pada metode konvensional berbasis uang tunai dan beralih menggunakan platform nontunai. Merespons pergeseran preferensi pelanggan tersebut, sejumlah pelaku usaha lokal yang sebelumnya hanya melayani transaksi tatap muka non-daring secara bertahap mulai menyediakan opsi pembayaran digital di lapak mereka. Fasilitas pelengkap ini dinilai sangat membantu menyederhanakan proses pertukaran nilai ekonomi dan memberikan kenyamanan lebih bagi pembeli.

Kendati menawarkan efisiensi, penetrasi sarana baru ini tidak serta-merta berjalan mulus dan merata di lapangan. Maimuna Katili menggarisbawahi bahwa pergeseran cara berniaga ini turut memunculkan tantangan tersendiri, utamanya bagi pelaku usaha yang terlanjur mapan dengan metode tradisional. Para pedagang ini dituntut untuk segera menyesuaikan diri agar tidak kehilangan pangsa pasar dan tetap mampu bertahan di tengah iklim perniagaan yang makin kompetitif. Oleh karenanya, ketersediaan program pelatihan serta pendampingan langsung sangat dibutuhkan guna menjembatani ketertinggalan literasi perangkat tersebut. Senada dengan hal itu, Serli Thalib

mengungkapkan fakta bahwa pemanfaatan peranti modern di Desa Popodu pada praktiknya belum terdistribusi secara utuh. Masih terdapat lapisan warga yang harus berhadapan dengan hambatan ganda, yakni keterbatasan akses kepemilikan perangkat dan kendala kecakapan personal dalam mengoperasikannya.

Melihat ragam realitas di atas, dapat ditarik analisis bahwa arus modernisasi di Desa Popodu berproses secara bertahap dan masih dalam fase transisi. Masyarakat desa ini tidak sedang melakukan perpindahan masif di mana seluruh entitas ekonominya telah sepenuhnya tersambung ke ekosistem digital. Fenomena yang terjadi merupakan sebuah proses adaptasi organik yang masih diwarnai oleh celah kesenjangan pemanfaatan. Di satu sisi, segmen masyarakat yang telah terpapar akses berhasil mengakselerasi produktivitas usahanya dan menembus batas distribusi komoditas. Namun di sisi lain, infrastruktur pengetahuan dan keterbatasan kepemilikan modal masih menjadi penahan laju bagi sebagian warga. Situasi tersebut mengonfirmasi bahwa modernisasi ekonomi di wilayah pedesaan memerlukan waktu penyesuaian yang proporsional, serta dukungan penguatan kapasitas agar sistem yang baru dapat dikelola secara menyeluruh tanpa meminggirkan para pelaku ekonomi yang masih berada dalam taraf tradisional.

Penetrasi peranti permesinan, perangkat komunikasi digital, hingga adopsi platform *Financial Technology* (FinTech) di Desa Popodu mengonfirmasi terjadinya proses modernisasi ekonomi pedesaan yang akseleratif. Akan tetapi, dari perspektif sosiologi ekonomi, modernisasi ini menghadirkan paradoks berupa kesenjangan pemanfaatan teknologi (*digital divide*). Kesenjangan ini melahirkan stratifikasi ekonomi baru: di satu sisi, terdapat kelompok pelaku usaha adaptif yang berhasil mengeskalasi produktivitas usahanya dan menjangkau pasar nirkabel secara luas; namun di sisi lain, merujuk pada temuan Serli Thalib dan Maimuna Katili, terdapat kelompok warga berskala tradisional yang rentan tersisih akibat hambatan literasi digital serta ketiadaan modal perangkat. Fakta ini menegaskan bahwa modernisasi pedesaan bersifat asimetris. Pemanfaatan inovasi teknologi berpotensi memarginalkan pelaku usaha lokal jika tidak dikawal dengan intervensi kelembagaan (seperti pelatihan berkelanjutan) guna memastikan bahwa transisi menuju ekosistem digital berlangsung secara inklusif tanpa meninggalkan entitas ekonomi konvensional (Ellis, 2000).

3.4 Sintesis Analitis: Resiliensi, Adaptasi, dan Transformasi Pedesaan

Melacak kembali rekam jejak panjang dari tahun 1998 hingga 2023, dapat disintesis bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Popodu guna menjawab rumusan masalah pertama telah bertransformasi dari entitas pedesaan tradisional yang sangat rentan terhadap fluktuasi iklim menuju ekosistem ekonomi yang lebih berdaya tahan dan terdiversifikasi. Transformasi struktural ini dibangun di atas fondasi tiga lintasan fase krusial: fase resiliensi reaktif ketika warga meredam kejut krisis 1998 melalui swasembada subsisten; fase transisi seiring masuknya perbaikan fasilitas publik, elektrifikasi, dan sarana kesehatan-pendidikan; serta bermuara pada fase modernisasi pasca-krisis yang ditandai oleh integrasi ekosistem digital dalam pola perdagangan lokal. Perubahan sosial masyarakatnya pun tidak berjalan statis, melainkan

bergerak dinamis merespons tumbuhnya ruang-ruang publik baru dan perluasan jangkauan komersial yang menjebol batasan geografi desa.

Berkenaan dengan proses adaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi guna mengupas rumusan masalah kedua kajian ini secara analitis menemukan bahwa strategi masyarakat Popodu tidak terejawantah secara seragam, melainkan terfragmentasi berdasarkan jenis kepemilikan modal dan keahlian spesifik profesi masing-masing. Pola adaptasi menunjukkan divergensi yang nyata: kelompok pekerja lahan dan nelayan pesisir mengadopsi strategi defensif (bertahan) dengan menjadikan lumbung produksi alam sebagai jaring pengaman logistik keluarga; berbanding terbalik dengan kelompok pedagang yang bermanuver secara ofensif dengan mengkapitalisasi perputaran uang harian di sektor ritel mikro.

Pola diferensiasi adaptasi ini kembali terulang ketika masyarakat berhadapan dengan gelombang modernisasi di tahun 2023. Kelompok usia muda atau pedagang progresif cenderung sangat reseptif memanfaatkan platform pembayaran daring untuk mengoptimalkan kapitalisasi usaha, sementara aktor-aktor ekonomi konvensional yang lebih senior terpaksa menempuh adaptasi lambat akibat belenggu literasi digital. Rangkaian temuan ini membuktikan secara empiris bahwa resiliensi dan transformasi pedesaan merupakan rentetan proses asimetris, yang membutuhkan kelihaian manajemen ketahanan hidup di tingkat komunal demi menyeimbangkan tradisi, geografi, dan kemajuan zaman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rekam jejak historis yang telah diuraikan, terdapat dua kesimpulan utama mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Popodu sepanjang rentang tahun 1998 hingga 2023. Pertama, kehidupan sosial ekonomi desa ini menunjukkan alur transformasi yang bergerak secara bertahap dari entitas tradisional yang rentan menuju ekosistem pedesaan yang lebih terdiversifikasi. Pada masa krisis 1998, kondisi masyarakat sempat tertekan akibat melambungnya harga kebutuhan pokok; namun pada fase pemulihan, perbaikan infrastruktur jalan, perluasan jaringan listrik, serta membaiknya akses pendidikan menengah dan kesehatan dasar (seperti posyandu) secara bertahap menunjang perbaikan kesejahteraan. Memasuki fase modernisasi menuju tahun 2023, struktur mata pencaharian warga mulai bervariasi dengan bertumbuhnya sektor jasa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meskipun pertanian terbukti tetap dipertahankan sebagai pilar utama ekonomi masyarakat.

Kedua, proses adaptasi masyarakat dalam menghadapi guncangan krisis dan tuntutan modernisasi pada praktiknya tidak berlangsung seragam, melainkan terfragmentasi berdasarkan jenis profesi dan kemampuan literasi. Saat meredam hantaman krisis moneter 1998, kelompok petani dan nelayan menerapkan strategi defensif dengan tetap bersandar pada pekerjaan utamanya guna mengamankan ketersediaan pangan keluarga, sedangkan kelompok pedagang mengambil langkah adaptif dengan mengoptimalkan celah perniagaan ritel lokal sebagai sumber pendapatan alternatif yang lebih tahan uji. Diferensiasi kelincahan ini kembali terlihat pada era digital; penetrasi inovasi seperti media sosial dan platform pembayaran nontunai (FinTech) lebih

cepat diakselerasi oleh kelompok pelaku usaha progresif untuk memperluas pasar, sementara sebagian pelaku ekonomi konvensional masih bertahan dengan cara tradisional akibat terbelenggu oleh keterbatasan kepemilikan perangkat dan kesenjangan literasi teknologi.

Berangkat dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk menjaga keberlanjutan roda ekonomi dan sosial masyarakat desa. Bagi pemerintah Desa Popodu, agenda pembangunan infrastruktur fisik perlu terus ditingkatkan untuk menopang pergerakan sektor-sektor unggulan desa, terutama pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tereskalasi. Secara khusus, penguatan sektor perdagangan lokal mutlak untuk terus didorong dan difasilitasi, mengingat rekam jejak historis telah membuktikan bahwa sektor ini mampu menjadi penopang ekonomi yang sangat diandalkan tatkala kondisi krisis melanda. Selain itu, seiring dengan tuntutan era digital, pemerintah desa beserta instansi terkait perlu merancang program pelatihan dan pendampingan teknologi yang berkesinambungan. Intervensi ini sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha kecil agar mereka mampu memanfaatkan instrumen teknologi secara optimal, sehingga tidak tertinggal oleh ketatnya persaingan ekonomi modern. Pada aspek pembangunan manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan layanan kesehatan harus senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama, karena kedua pilar inilah yang paling menentukan lahirnya sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas di masa depan. Terakhir, bagi para peneliti selanjutnya, temuan dalam kajian historis ini disarankan untuk dijadikan landasan guna melakukan studi yang lebih mendalam, khususnya untuk mengkaji dampak jangka panjang dari proses modernisasi dan digitalisasi terhadap pergeseran sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara spesifik.

5. Daftar Pustaka

- Alamsyah, A., Hasmawati, Sahurri, Yunus, S., & Syukri, F. (2023). The role and contribution of technology in supporting the economic potential of communities in rural areas. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 263–271.
- Ambabunga, Y., Ashari, D., Ibrahim, A. F., Rantererung, C. L., Pasae, Y., Buku, A., & dkk. (2024). *Industri kelistrikan dalam transisi energi*. Arsy Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2023). *Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 di Kawasan Kampung Tangguh Pluit-Penjarangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>
- Hasan, M., & Aziz, M. (2018). *Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi*. Pustaka Taman Ilmu.

- Herawati, H., & Gustan, M. (2020). Penyebab dan upaya yang dilakukan para pemerintah dunia saat krisis global 2008. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2(1), 22–29. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1442>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Kandar, I. R. (2014). Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunung Kidul masa Revolusi Hijau (1970–1974) [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta]. Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Karmeli, E., & Fatimah, S. (2008). Krisis ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2).
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi pedesaan: Pengantar untuk memahami masyarakat desa*. LP2M UPN Veteran Yogyakarta.
- Pemerintah Desa Popodu. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Popodu 2018–2026*. Pemerintah Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki.
- Pemerintah Desa Popodu. (2023). *Profil dan data kependudukan Desa Popodu tahun 2023*. Sistem Informasi Desa Popodu.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52.
- Putriani, I., dkk. (2023). Kehidupan petani garam: Sejarah sosial ekonomi di Desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto 2012–2020. *Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, 21(1), 78.
- Riswanto, A., dkk. (2023). *Buku ajar pengantar ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Safitri, N., & Sa'diyah, E. R. C. (2022). *Monograf efektivitas FinTech pada UMKM*. Pustaka Peradaban.
- Singgih, M. N. (2020). Strategi penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai refleksi pembelajaran krisis ekonomi Indonesia. *Ekonomi Modernisasi*, 3(3), 218–227.
- Wahjoedi, W., Wardoyo, C., Maizuari, A., Salsabila, A. A., Sholikhah, A. M., Rahmayanti, D. A., & dkk. (2025). *Menuju perekonomian Indonesia berkelanjutan*. Kreatifa Publishing House.
- Yuliati, U., & Mu'ammal, I. (2022). *Buku monograf kewirausahaan usaha kecil menengah desa wisata Pujon Kidul (Suatu tinjauan saat COVID-19)*. CV. Pustaka Peradaban